

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KELURAHAN KABUPATEN, KECAMATAN KLATEN TENGAH, KABUPATEN KLATEN

Oleh : Joko Suprpto

Joko Suprpto, 2012. Evaluasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Thesis (unpublished). Universitas Slamet Riyadi.

It is considered that the poverty reduction programs launched by the government in the past tended not in the frame of community empowerment, but on the other hand the programs created the dependency of the poor upon the state and outside aids. In overcoming that problem, the government launches what so called Sub District Development Program (Program Pengembangan Kecamatan/ PPK). It is expected that such program enable to create employment for the poor which in turn, is able to increase the poor's income. This research was conducted to evaluate the degree of success as well of failure, and the degree of effectiveness and efficiency of the program. The research site is in Klaten Sub District, Klaten Regency. Strategy of the research used qualitative reserch method. Purposive sampling was chosen to select the informen. Informen in this study were Activity Management Team (Tim Pengelola Kegiatan), LPM, facilitators, Monitoring Team, Maintenance Team, and vocational training beneficiaries. Interview and Focus Group Discussion were employed for collecting data. Interactive data analysis model as recommended by Miles and Buberan was done to analyse data. To validate the finding, triangulation technique by comparing the other data as well as the other sources was used. Research result shows that the plan, implementation and evaluation of the program are supported by either program implementer at local level, human resources as well as financial resource, or by the existing facilities. Research result indicates that human resources qualitatively as well as quantitatively have been fulfilled, community awareness and community participation found high. Implementation of the program found to focus for increasing community well being, community skill, reducing unemployment level, and empowering community.

Keyword: Evaluation, Sub District Development Program (PPK), plan, implementation, community empowerment.

Pendahuluan

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pertengahan tahun 1997, berbagai masalah baru dalam bidang sosial, politik, pertahanan dan keamanan muncul menjadi krisis multi dimensi. Masalah ekonomi yang menonjol adalah meningkatnya jumlah pengangguran dan

memburuknya kondisi keluarga miskin. Permasalahan yang perlu direnungkan adalah apa yang menjadi penyebab utama kemiskinan, sehingga warga miskin makin hari makin bertambah, kenyataan menunjukkan makin banyak anak putus sekolah, makin banyak yang kekurangan gizi, banyak yang tidak memenuhi kesehatan dasar dan lain sebagainya.

Dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga, (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) BKKBN (1996 : 14) menetapkan lima kriteria yaitu kualitas perumahan, kualitas sandang, kualitas pangan, kualitas keberagamaan, dan kualitas kesehatan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel hasil pendataan keluarga menurut tingkat kesejahteraan di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, tahun 2005 – 2007, sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Keluarga
Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten
Tahun 2005 – 2007

No	Tingkat Kesejahteraan	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
1	Keluarga Pra Sejahtera	59	57	57
2	Keluarga Sejahtera I	196	160	299
3	Keluarga Sejahtera II	368	460	332
4	Keluarga Sejahtera III	425	432	432
5	Keluarga Sejahtera III Plus	143	146	147

Sumber : Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, 2008

Penduduk yang masuk dalam kategori miskin adalah penduduk yang masuk dalam kelompok Pra Sejahtera dan Sejahtera I Alasan Ekonomi. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir ini jumlah penduduk miskin di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, mengalami fluktuasi.

Program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung tidak dalam kerangka “pemberdayaan” masyarakat justru sebaliknya memperkuat “ketergantungan” kelompok miskin terhadap Negara atau pihak pemberi bantuan. Untuk itu pemerintah membuat program yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai upaya penanggulangan

kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan tersebut sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan serta perluasan pilihan kegiatan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Program penanggulangan kemiskinan melalui PPK ini diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin (mengatasi masalah pengangguran) dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin.

Belajar dari banyak kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini yang dilakukan di Indonesia, maka PPK dikembangkan sebagai salah satu alternatif karena program ini berpihak dari konsep “*empowerment*” yang menekankan pada perlunya program penanggulangan kemiskinan dikerangkakan pada penguatan masyarakat sipil dan partisipasi penuh masyarakat (kelompok sasaran) dalam perumusan dan pelaksanaan program.

Keberhasilan program kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan masyarakat. Sebagaimana tujuan pelaksanaan program kebijakan penanggulangan kemiskinan yang akan dicapai, sangat berkaitan erat dengan komponen-komponen dari implementasi kebijakan itu sendiri, yakni, perencanaan, monitoring dan evaluasi. Sementara itu bermunculan isu-isu tentang kurang berhasilnya pelaksanaan program kebijakan penanggulangan kemiskinan, dikarenakan kurangnya pengawasan dalam penggunaan dana program penanggulangan kemiskinan. Sudah banyak kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia selama ini. Baik penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah secara nasional dan daerah. Namun hasilnya belum maksimal. Hal ini disebabkan program penanggulangan kemiskinan itu masih bersifat parsial, sektoral dan dilaksanakan sendiri-sendiri.

Berawal dari berbagai masalah di atas, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, diharapkan dapat menjadi alternatif pemecahan masalah dalam penanggulangan kemiskinan. PPK sebagai program penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengatasi pengangguran (perluasan kesempatan kerja) dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

Program Pengembangan Kecamatan di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang berlangsung pada tahun 2006 dan 2007, hasil kegiatan

yang telah dilaksanakan PPK antara lain adalah kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang sampai saat ini dikelola di UPK Kecamatan Klaten Tengah dengan total pinjaman sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp. 213.000.000,- untuk 13 kelompok SPP, Sedangkan kegiatan pelatihan ketrampilan telah diadakan pelatihan untuk 18 orang untuk pelatihan ketrampilan menjahit dasar dan mahir, 18 orang untuk pelatihan ketrampilan bengkel sepeda motor, 9 orang untuk pelatihan ketrampilan bengkel mobil bensin, 28 orang untuk setir mobil. Adapun untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana telah dibangun paving jalan seluas 2.149 M² di RW I Tegal Blateran dan RW II Blateran, Aspal Jalan seluas 1.065 M² di RW X Kampung Sidowayah dan RW XI Kampung Sidorejo.

Disisi lain masih munculnya hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dan hambatan pelaksanaan PPK menjadi permasalahan tersendiri. Kondisi ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berorientasi evaluasi terhadap Program Pengembangan Kecamatan di Kelurahan Kabupaten dalam kerangka untuk memberdayakan masyarakat, dalam hal ini penulis berusaha menggambarkan tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienan suatu kebijakan atau pelaksanaan program sehingga dengan kajian ini dapat memberikan bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program untuk meningkatkan kemajuan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan.

Evaluasi terhadap PPK yang dilakukan di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, ini menitikberatkan pada keinginan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik

William Dunn (2003 : 608) mengemukakan bahwa "evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program". Lebih lanjut Dunn (2003 : 608) mengemukakan bahwa :

"Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaiannya (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya".

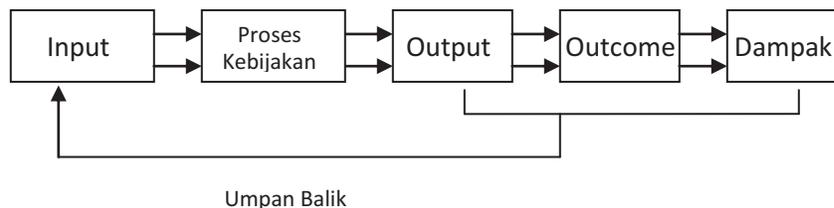
Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai/manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya memperoleh nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna.

Menurut Dye (dalam Subarsono, 2005 : 122), bahwa :

“Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam studi evaluasi kebijakan, yang belakangan dideskripsikan sebagai eksperimentasi kebijakan: (1) Penentuan apa tujuan yang akan dicapai oleh program. Siapa kelompok target dan apa efek yang diharapkan? Pemerintah seringkali menghendaki tujuan yang bertentangan untuk memuaskan berbagai kelompok sekaligus. Ketika tidak ada kesepakatan mengenai tujuan program dan kebijakan, maka studi evaluasi kebijakan akan dihadapkan pada konflik kepentingan yang besar; (2) Sejumlah program dan kebijakan lebih memiliki nilai simbolis. Program dan kebijakan tersebut tidak secara aktual merubah kondisi kelompok target, melainkan semata-mata menjadikan kelompok tersebut merasa bahwa pemerintah “memperhatikan”; (3) Agen pemerintah memiliki kepentingan tetap yang kuat dalam “mencoba” apakah program membawa dampak positif. Administrator seringkali melakukan percobaan untuk mengevaluasi dampak program yang dibuat bagaikan mencoba membatasi atau merusak programnya atau mempertanyakan kompetensi administrator; (4) Agen pemerintah biasanya memiliki investasi besar yaitu organisasi, finansial, fisik, dan psikologikal pada program dan kebijakan yang sedang dikerjakan; (5) Sejumlah studi empiris mengenai dampak kebijakan yang dikerjakan oleh agen pemerintah mencakup sejumlah gangguan terhadap kegiatan program yang sedang berjalan; (6) Evaluasi program memerlukan pembiayaan, fasilitas, waktu, dan pegawai yang mana agen pemerintah tidak ingin berkorban dari program yang sudah berjalan”.

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Evaluasi kebijakan pada umumnya dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, efektivitas dan efisiensinya. Evaluasi kebijakan sangat perlu dilakukan untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan (*sustainable*) suatu program.

Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dapat dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Kebijakan sebagai suatu proses dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kebijakan Sebagai Suatu Proses
(Sumber : Subarsono, 2005 : 121)

Input adalah bahan baku (*raw materials*) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, tuntutan-tuntutan dan dukungan masyarakat. *Output* adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program. *Outcome* adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Sedangkan *impact* (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Menurut Brigman dan Devis, secara umum evaluasi kinerja kebijakan mengacu pada empat indikator pokok, yaitu (Wibawa, 1994 : 138-139) : Indikator Input, Indikator Proses (*Process*), Indikator Hasil (*Outputs*), dan Indikator Dampak (*Outcomes*)

Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan berarti ketiadaan rumah, jika sakit tidak dapat berobat ke dokter, tidak dapat bersekolah dan tidak tahu baca tulis, tidak punya pekerjaan, khawatir tentang masa depan dan hidup hanya untuk hari ini, kehilangan anak karena sakit yang disebabkan oleh ketiadaan sarana dan prasarana kesehatan, tidak punya daya dan kehilangan jati diri dan kebebasan. Dengan kata lain, kemiskinan memiliki banyak wajah, berubah dari waktu ke waktu dan dapat dipaparkan dengan berbagai cara. Tetapi yang sudah pasti “*poverty is a situation people want to escape*”.

“Masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat bukanlah sekedar kemiskinan struktural, natural, absolut atau relatif tetapi juga kemiskinan moral. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan kemajuan; kemiskinan natural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh pemiskinan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghidupi masyarakat; kemiskinan absolut struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakterpenuhinya kebutuhan hidup standar minimum suatu komunitas; Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan kemajuan”. (Sumodiningrat, 1998 : 28-29).

Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan

material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia berikut ini : terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu; terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.

Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di Puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan dan asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial pada penduduk miskin; terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi.

Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta pada tahun 1996. Namun, masalah kemiskinan masih belum tuntas tertangani. Kemiskinan cenderung memusat di daerah pedesaan yang terpencil dan terisolasi, dan kawasan padat penduduk di perkotaan.

Aktivitas utama dari penanggulangan kemiskinan selama ini didominasi oleh dua pendekatan, yaitu: (1) pendekatan pemenuhan konsumsi per kapita (menggunakan garis kemiskinan dan bersifat makro). Pasokan datanya dikerjakan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) / Biro Pusat Statistik (BPS); dan (2) pendekatan yang berbasis keluarga. Pendekatan ini memiliki patokan 8 (delapan) ciri rumah tangga miskin, yaitu: (1) luas lantai rumah kurang dari 8 m²; (2) jenis lantainya tanah; (3) menggunakan air hujan atau dari sumber

air tak terlindung sebagai pasokan air bersih; (4) tidak memiliki jamban; (5) tidak memiliki asset; (6) tidak ada ketersediaan lauk pauk, atau ada sedikit lauk pauk tapi tidak bervariasi; (7) tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosial; dan (8) tidak pernah membeli pakaian. Pendekatan yang kedua ini biasa dilakukan oleh BKKBN. BKKBN menggolongkan masyarakat menjadi pra-sejahtera (miskin), sejahtera I (sedikit di atas ambang garis kemiskinan) dan sejahtera II (jauh di atas ambang kemiskinan).

Kedua pendekatan di atas banyak memiliki kelemahan mendasar, yaitu : Pertama, kedua pendekatan tersebut di atas tidak membuka peluang bagi suara dan aspirasi orang miskin. Hal itu berarti definisi kemiskinannya bisa ditafsirkan berbeda dengan definisi kemiskinan dari orang miskin itu sendiri. Akibatnya, definisi dan operasionalisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak cukup layak untuk memahami realitas kemiskinan yang sesungguhnya terjadi. Kedua, kedua pendekatan tersebut menimbulkan konsekuensi operasionalisasi teknis kegiatan penanggulangan kemiskinan menjadi pendekatan ekonomi yang bersifat kedermawanan (*charity*). Hal itu berarti orang miskin menjadi obyek dari suatu aktivitas yang bersifat proyek dan hanya mampu menjawab masalah dalam jangka pendek. Ketiga, kedua pendekatan tersebut tidak memiliki kepekaan terhadap keragaman konteks wilayah, sektoral maupun kedalaman kemiskinan. Keempat, kedua pendekatan itu tidak bisa diharapkan dapat menyumbang proses demokratisasi karena hanya menghasilkan pola hubungan subordinat di mana "pengendali proyek" penanggulangan kemiskinan sebagai "si dermawan" dan lapisan miskin sebagai "yang terpilih untuk dikasihani". Kelima, kelemahan mendasarnya adalah kedua pendekatan itu gagap dan mengingkari persoalan yang menjadi akar masalah atau sebab-musabab kemiskinan.

Ciri pokok dari penanggulangan kemiskinan di masa lalu, yaitu : (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sendirinya akan membereskan kemiskinan; (2) kemiskinan lebih banyak dilihat sebagai kurangnya pendapatan dan kurangnya konsumsi, dan (3) kemiskinan dianggap sebagai gejala kantong-kantong kemiskinan.

Menurut Laode Ida (2002 : 24) pemberantasan kemiskinan dimasa lalu menganut paham bahwa, perlu ada program khusus yang ditujukan secara langsung untuk mengurangi penduduk miskin (<http://komfis.wordpress.com>). Paham ini tidak memahami penyebab atau akar masalah, tetapi hanya mengobati akibat.

Realitas kemiskinan yang semakin meluas saat ini menunjukkan bahwa, tatanan ekonomi, politik, sosial dan budaya justru berperan besar dalam melanggengkan kemiskinan itu sendiri. Hal ini dapat dicermati dari masalah sistem alokasi sumber daya alam,

kecenderungan utama dalam tatanan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menguatkan proses pemiskinan rakyat, antara lain : (1) luasnya ekspansi modal dan permintaannya terhadap ketersediaan tanah murah dalam skala besar; (2) politik hukum agraria yang tidak adil dan (3) sistem politik pemerintahan yang hegemonik. Ketiga kecenderungan utama di atas memberikan kontribusi terhadap membesarnya jumlah petani gurem (petani dengan pemilikan dan penguasaan tanah tidak lebih dari 0,2 hektar) dan petani tuna kisma (petani tanpa pemilikan dan penguasaan tanah pertanian), serta petani di luar Jawa yang tercerabut dari akar budaya aslinya karena diklaim Pemerintah sebagai perambah hutan dan terasing yang harus "dimodernkan" tapi dengan syarat melepas tanah adatnya. (<http://komfis.wordpress.com>).

Dari tahun ke tahun pemerintah selalu membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan terutama setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Kebijakan pengentasan atau penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1998 : 46-47) bahwa:

”Kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup : (1) pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan”.

Pada masa orde baru telah dilaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal), kemudian pada tahun 1998/1999 dan 1999/2000 dilaksanakan Program JPS (Jaring Pengaman Sosial) dengan beberapa bidang intervensi/program. Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan kebijakan pemerintah untuk meminimalisasi dampak primer dan sekunder krisis, melalui integrasi berbagai program, baik yang khusus dirancang untuk mengatasi dampak negatif krisis maupun berbagai program reguler pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Perlu juga diperhatikan disini bahwa JPS sama sekali bukan intervensi terhadap penyebab krisis ekonomi, tetapi hanya bersifat pertolongan (*rescue*) pada jangka waktu yang pendek.

Menurut Suharto (2003 : 17) bahwa ”hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (*modernization paradigm*) yang bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi dan model yang berpusat pada produksi (*production centered*)” (<http://komfis.wordpress.com>). Paradigma tersebut memiliki berbagai

kelemahan sehingga diperlukan paradigma baru yang lebih berpusat pada manusia (*people centered*). Paradigma baru studi kemiskinan, antara lain: (1) kemiskinan sebaiknya tidak hanya dari karakteristik orang miskin yang statis, melainkan dilihat secara dinamis; (2) indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan komposit; (3) konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap dari pendapatan dalam memotret dinamika kemiskinan; dan (4) pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencarian (*livelihoods capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola aset (*assets management*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*).

Dalam perspektif hak, kaum miskin dilihat sebagai manusia yang bermartabat. Kebijakan yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang memihak mereka (*Not pro-poor policy*), tetapi suatu kebijakan yang berdasar pada kepentingan aktualisasi hak-hak dasar mereka. Memosisikan manusia bermartabat tetapi sebagai obyek kebijakan, berbeda dengan memosisikan manusia bermartabat sebagai subyek kebijakan. Perspektif hak memberi prinsip dasar dalam penanggulangan kemiskinan di masa depan, yakni pendekatan berbasis hak-hak dasar kaum miskin dalam program dan strategi penanggulangan kemiskinan (<http://komfis.wordpress.com>).

Inisiatif *grand-strategy* dari paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan yang memiliki nilai dasar : penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar kaum miskin. Realitas kemiskinan saat ini menunjukkan bahwa, telah terjadi proses penghancuran martabat manusia. Amartya Sen menjelaskan tentang masalah penghancuran kapabilitas manusia dan dampaknya terhadap proses pemiskinan secara individu maupun kolektif.

Strategi yang dapat dikembangkan dalam perspektif hak kaum miskin antara lain : pertama, memastikan hak-hak dasar kaum miskin diakui. Tidak cukup hanya dengan dinyatakan dalam konstitusi (secara hukum), tetapi harus dipastikan dalam setiap tindakan bahwa hak-hak dasar kaum miskin tidak akan dikhianati. Kedua, hak-hak dasar kaum miskin tersebut tidak dapat diberikan atau dicabut. Dengan demikian peran Negara dalam hal ini harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar kaum miskin tersebut. Ketiga, dalam kerangka negara melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menghormati,

melindungi, dan memenuhi hak-hak kaum miskin, maka Negara seyogianya melakukan tindakan politik tanpa diskriminasi. Keempat, wilayah strategis dalam penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada konteks wilayah dan sektor. Kenyataan kemiskinan di perdesaan adalah karena ketiadaan akses terhadap sumber daya yang memberi keamanan bagi keberlanjutan hidup (<http://komfis.wordpress.com>).

Mencermati beberapa kelemahan paradigma modernisasi dan realitas tingginya jumlah penduduk miskin walaupun telah banyak dilakukan intervensi program penanggulangan kemiskinan, maka paradigma yang digunakan merupakan konvergensi paradigma pembangunan berpusat pada manusia dan paradigma pendidikan kritis.

Menurut Maksum dan Ruhendi (2004 : 86) bahwa "kesadaran magis dan kesadaran naif berkaitan dengan perspektif berpikir masyarakat di era pra-modern dan modern, sedangkan perspektif berpikir masyarakat post-modern cenderung berada pada kesadaran kritis" (<http://komfis.wordpress.com>). Kemampuan berpikir kritis harus diterima secara politis dalam konteks politik pendidikan dan pelembagaannya harus mengalami penguatan praksis pada tingkat pembelajaran. (<http://komfis.wordpress.com>). Sebagai contoh, yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran kritis akan memandang sistem dan struktur sebagai penyebab kemiskinan, sedangkan mereka yang memiliki kesadaran naif memandang kesalahan diri sendiri sebagai penyebab kemiskinan.

Selanjutnya pemerintah membuat program baru sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dimana program tersebut merupakan perwujudan nyata dari upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. PPK merupakan kelanjutan dari program IDT dan P3DT dan telah dimulai sejak tahun anggaran 1998/1999 dan berakhir tahun 2001. Perbedaan yang ada lebih dari upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan serta perluasan pilihan kegiatan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Pada PPK masyarakat terus didorong dan dikuatkan untuk dapat mengorganisir diri termasuk menentukan kegiatan sendiri kegiatan pembangunan daerahnya secara musyawarah sesuai dengan kebutuhannya.

Program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut di atas belum sepenuhnya dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Untuk itu perlu diupayakan

adanya sebuah kebijakan yang dapat meningkatkan akses penduduk miskin untuk menguasai, memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang tersedia sehingga mereka dapat menciptakan peluang kerja serta mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara mandiri. Upaya yang perlu dipikirkan adalah berusaha merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan akses penduduk miskin pada pengontrolan dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan tentang pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka.

Sebuah kebijakan dapat memberi dampak positif maupun negatif terhadap kelompok sasaran (target). Oleh karena itu perlu dilakukan analisis, apakah kebijakan tersebut benar-benar memberi dampak positif sesuai dengan target pembuat kebijakan atau malah sebaliknya yaitu menimbulkan dampak negatif bagi kelompok sasaran (target). Analisis dampak kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yang menarik untuk dicermati. Daya tarik ini minimal didasarkan pada tiga hal penting. *Pertama*, konteks desentralisasi pemerintahan yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. *Kedua*, studi tentang dampak kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh berbagai pihak (kalangan akademisi dan praktisi). *Ketiga*, esensi dan urgensi evaluasi kebijakan publik, karena kemanfaatan kebijakan yang dievaluasi terlihat melalui dampaknya terhadap sasaran (target) yang dituju.

”Akibat yang dialami dengan keadaan seperti ini adalah, usaha penanggulangan kemiskinan bersifat parsial, tidak komprehensif, serta hasil yang dicapai dari segala upaya penanggulangan tersebut menjadi tidak tepat sasaran” (Suparlan, 1993 : xiv).

Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya.

Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu. ”Setiap upaya penanggulangan kemiskinan yang mengabaikan kedua hal tersebut tidak hanya cenderung tidak efektif, tetapi pada tempatnya dicurigai sebagai retorika belaka” (Baswir, 1999 : 18).

”Arah baru strategi pembangunan diwujudkan dalam bentuk : (1) upaya pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan masyarakat, (2) pemantapan otonomi dan desentralisasi, dan (3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat” (Sumodiningrat, 1998 : 82).

Untuk merealisasikan arah baru pembangunan tersebut, maka pemerintah perlu lebih mempertajam fokus pelaksanaan strategi pembangunan yaitu melalui penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat maupun birokrasi. Penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan model pembangunan partisipatif yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat birokrasi dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat (*good governance*).

”Model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 1998 : 223).

Berdasarkan model pembangunan tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek/program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat.

Penguatan kelembagaan di sini tidak hanya berarti penguatan secara fisik saja, seperti bangunan, struktur, atau hanya kelengkapan organisasi, tetapi lebih kepada penguatan fungsi dan perannya sebagai lembaga/organisasi yang diserahi tugas dan wewenang melaksanakan, memantau, atau menjaga program pembangunan di wilayahnya. Dengan menguatnya kelembagaan masyarakat setempat terutama berkaitan dengan fungsi dan peran sebagai lembaga masyarakat yang diterima dan dipercaya oleh warga masyarakatnya, jika program pembangunan diserahkan pelaksanaannya kepada lembaga tersebut, maka partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut dapat dijamin tergolong tinggi.

Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraannya. Melalui kadar partisipasi dan peran aktif masyarakat yang tinggi, penguatan masyarakat sasaran program dapat terwujud. Menguatnya kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya, adalah hasil atau dampak dari semua aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Penguatan masyarakat tersebut dapat dilihat dari: (1) dimensi pemberdayaan masyarakat miskin, (2) dimensi terwujudnya kemandirian masyarakat miskin, dan (3) dimensi perekonomian rakyat. Dimensi pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan terutama dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonominya. Dimensi kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Sedang dimensi perekonomian rakyat dapat ditandai oleh tersedianya dana untuk modal usaha guna dikembangkan oleh masyarakat miskin itu sendiri.

Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

PPK adalah kebijakan dan program masyarakat pedesaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu berkelanjutan. Visi PPK adalah kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin pedesaan. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Misi PPK adalah (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengoptimalan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi PPK, strategi yang dikembangkan PPK yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran dan penguatan sistem pembangunan partisipatif.

Arahan dan Tujuan Kebijakan Program PPK

Arahan kebijakan program PPK diprioritaskan pada: (1) peningkatan ketahanan pangan (*food security*), (2) penciptaan lapangan kerja produktif (*employment creation*), (3) pengembangan usaha kecil dan menengah (*small and medium enterprises*), dan (4) perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan (*social protection*).

Pemerintah melalui program PPK berusaha mengatasi masalah yang sifatnya penyelamatan (*rescue*) dan pemulihan (*recovery*). Melihat prioritas kegiatan tersebut menunjukkan bahwa program PPK ini lebih bersifat jangka pendek dalam menangani dampak krisis yang melanda masyarakat.

Prinsip yang menonjol dalam pelaksanaan program PPK adalah prinsip pembangunan partisipatif. Melalui prinsip ini diharapkan bantuan kepada masyarakat dapat disalurkan secara tepat dan prioritas masyarakat. Berkaitan dengan prinsip partisipatif, strategi yang diterapkan dalam program PPK adalah keterpaduan pertumbuhan dengan pemerataan secara berkelanjutan yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat (*capacity building*) dalam pengembangan masyarakat (*community development*), dengan menyertakan konsultan sebagai fasilitator dan pemantau. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) yang telah ada maupun yang perlu dibentuk untuk mewadahi kegiatan PPK.

Tujuan program PPK adalah (1) meningkatkan peran serta masyarakat terutama rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan, (2) melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal, (3) mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, (4) Menyediakan sarana prasarana sosial dasar yang diprioritaskan oleh masyarakat, dan (5) Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada rumah tangga miskin. Pemerintah berupaya membuat sejumlah skema atau kegiatan proyek PPK yang didanai melalui DIP (pembangunan sektoral dari pusat) baik bantuan pembangunan daerah yang bersifat desentralisasi, maupun bantuan langsung masyarakat (BLM).

Lokasi sasaran meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan : Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori "kecamatan bermasalah dalam PPK", Kecamatan-kecamatan yang

diusulkan oleh pemerintahan daerah dalam skema *cost sharing*. Kelompok sasaran : RTM di pedesaan, Kelembagaan masyarakat di pedesaan, Kelembagaan pemerintahan lokal.

Pendanaan PPK bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), *Cost sharing* dari anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), Partisipasi dunia usaha, Swadaya Masyarakat.

Ketentuan dasar PPK

Ketentuan dasar PPK dimaksudkan untuk mencapai tujuan PPK secara lebih terarah. Ketentuan dasar PPK meliputi: Desa Berpartisipasi, Swadaya Masyarakat dan Desa, Jenis Kegiatan dibiayai dan jenis kegiatan yang dilarang, mekanisme usulan kegiatan, keberpihakan pada perempuan, sanksi, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Lokal, Pelembagaan UPK dan Kelompok Usaha Ekonomi/SPP,

Pelaku PPK di Pedesaan.

Masyarakat adalah pelaku utama PPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PPK dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Pelaku PPK di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PPK di desa. Pelaku PPK di desa meliputi : Kepala Desa, BPD, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau, Tim Pemelihara, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk mengetahui masalah yang sedang diteliti secara mendalam untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*) (Moleong, 1999 : 165).

Informan yang dipilih adalah Tim Pengelola Kegiatan, Fasilitator, Tim Penulis Usulan, Kelompok Perempuan, Ketua RT/RW, LPM, Tim Monitoring, Tim Pemelihara,

dan Penerima Manfaat Pelatihan Ketrampilan. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada kesimpulan bahwa informan tersebut dianggap mengerti dan mengetahui secara mendalam tentang bagaimana pelaksanaan dan hasil-hasil pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di wilayah Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Informan ditentukan dengan maksud untuk memperoleh informasi melalui wawancara dan FGD.

Analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis interaktif dari Faizal (1999 : 256 - 258), yaitu bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data (*display*) dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Ketiga komponen tersebut aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data yang menggunakan proses siklus. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang dilakukan selama berlangsungnya proses penelitian. Proses reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pelaksanaan penelitian sampai dengan laporan akhir. Reduksi data yang dilakukan merupakan bagian analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan membuang hal-hal yang tidak penting serta mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Sajian data merupakan rangkaian informasi untuk mempermudah pemahaman yang disusun secara sistematis berdasar reduksi yang dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini informasi-informasi yang telah diperoleh selama penelitian dirakit untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Selama mengadakan penelitian data yang diperoleh merupakan kalimat-kalimat yang berasal dari jawaban kuesioner, observasi, wawancara dengan informan, serta berupa arsip-arsip dan catatan-catatan.

Untuk menguji validitas, reabilitas dan obyektifitas data penelitian yang sudah diperoleh, peneliti menggunakan teknik *triangulasi* yaitu suatu teknik yang ditempuh untuk menemukan data lain sebagai pembanding (Moleong, 1999 : 178). Melalui teknik *triangulasi* peneliti berusaha mengkonfirmasi informasi-informasi yang telah dikumpulkan dengan sumber-sumber lain yang relevan untuk memperoleh tanggapan, melengkapinya dan menguranginya. Pelaksanaan teknik ini didasarkan atas empat kriteria yaitu (Moelong, 1999 : 173-174) derajat kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), Kepastian (*confirmability*).

Hasil dan Pembahasan

Kelurahan Kabupaten, merupakan salah satu kelurahan dari 9 desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, memiliki luas wilayah 53 Ha, terdiri dari pemukiman/pekarangan 38,90 Ha (73,40 persen), industri/perdagangan 6,02 Ha (11,36 persen), perkantoran/sekolah 1,40 Ha (2,64 persen), tempat umum 0,34 Ha (0,64 persen), dan lain-lain 6,34 Ha (11,96 persen). Kelurahan Kabupaten, berada di pusat kota Klaten dengan jarak dari pusat pemerintahan kecamatan sejauh 1 Km, dan dari ibukota kabupaten/kota adalah 1,2 Km. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut wilayah Kelurahan Kabupaten, mempunyai ketinggian 153 m di atas permukaan air laut (dpl). Secara administratif, Kelurahan Kabupaten, terbagi kedalam 12 RW dan 39 RT.

Sumber daya manusia sangat menentukan maju mundurnya suatu organisasi. Kondisi sumber daya manusia di Kantor Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, baik Kepala Kelurahan dan Staf adalah Pegawai Negeri Sipil. Jumlah pegawai yang ada di Kantor Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten adalah sebanyak 8 orang dengan latar belakang pendidikan S-1 sebanyak 3 orang, D-3 sebanyak 1 orang dan SMA sebanyak 4 orang.

Berdasarkan data monografi kelurahan tahun 2008, Jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Kabupaten, adalah 4.261 jiwa, terdiri dari 1.216 kepala keluarga, penduduk laki-laki sebanyak 2.059 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.202 jiwa.

Jumlah penduduk Kelurahan Kabupaten paling banyak adalah penduduk dengan umur 20 – 24 tahun yaitu sebesar 449 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki umur produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam kategori anak-anak dan orang tua (lansia). Hal ini dikarenakan Kelurahan Kabupaten, merupakan daerah pusat perkotaan yang merupakan pusat perdagangan dan jasa dengan wilayah cukup strategis dan mudah dijangkau, serta terdapat pasar induk Kabupaten Klaten, sehingga sebagian besar penduduk dengan usia produktif memilih menetap di wilayah Kelurahan Kabupaten.

Diketahui bahwa pekerjaan penduduk sebagian besar adalah letak Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, yang merupakan pusat perdagangan dan jasa, dan terdapat pasar induk, serta memiliki wilayah yang cukup strategis sehingga sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari berdagang dan menjual jasa.

Dalam melakukan kegiatan baik fisik maupun non fisik di wilayah Kelurahan Kabupaten, didukung oleh beberapa kelembagaan kelurahan yang memiliki peran sangat strategis. Kelembagaan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut: Perangkat Kelurahan 8, RW 12, RT 39. LPM 26, TP PKK Kelurahan 23, Karang Taruna Kelurahan 35, Hansip/Linmas 36.

Dari lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas, tanggung jawab serta ruang lingkup yang berbeda-beda, yang diharapkan dapat bersinergi untuk memecahkan permasalahan yang timbul dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan PPK tidak dapat terlepas dari pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya. Pelaku-pelaku PPK sangat menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari PPK itu sendiri. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Berdasarkan temuan data penelitian dapat diketahui bahwa kondisi sumber daya manusia pelaku PPK di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan D-3 dan S-1, meskipun ada beberapa yang memiliki latar belakang pendidikan SMA. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa secara kualitas kondisi sumber daya manusia pelaku PPK sudah memadai, begitu pula secara kuantitas sudah disesuaikan dengan kebutuhan.

Pelaksanaan PPK di Kelurahan Kabupaten.

Secara umum pelaksanaan PPK di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, melalui tahapan sebagai berikut:

a. Musyawarah Desa I (Musdes I)

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kelurahan Kabupaten, mulai dari dilaksanakannya Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD Sosialisasi) ditingkat kecamatan. Ditingkat kelurahan kemudian ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Musyawarah Desa Sosialisasi, merupakan sosialisasi awal tingkat kelurahan sebagai wahana desiminasi PPK yang dihadiri oleh Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik (FT), Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dan Instansi terkait, baik tingkat kecamatan maupun kelurahan serta perwakilan warga masyarakat.

b. Pelatihan Fasilitator Desa

Pelatihan dilaksanakan selama 4 (empat) hari di Aula Kantor Kecamatan Klaten Tengah, yang didalamnya dijelaskan tentang cara-cara mensosialisasikan PPK ditingkat RW, teknik memfasilitasi pertemuan ditingkat dusun dalam rangka menggali gagasan dan memilih wakil.

c. Pertemuan Kelompok RW

Fasilitator setelah mendapatkan pelatihan dari Kecamatan, melaksanakan tugas mensosialisasikan PPK dan mengadakan penggalan gagasan di masing-masing RW. Dari penggalan gagasan inilah kemudian muncul usulan yang disepakati untuk diusulkan RW ke tingkat kelurahan.

d. Musyawarah Desa Khusus Perempuan

Kelompok perempuan diberi hak untuk mengusulkan 2 kegiatan dari 3 kegiatan yang akan diusulkan oleh kelurahan, dalam hal ini kelompok perempuan diberdayakan dalam proses perencanaan. Dua kegiatan yang diusulkan oleh kelompok perempuan adalah : SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan), Pelatihan Keterampilan.

e. Musyawarah Desa II (Musdes II)

Usulan yang masuk ke kelurahan masing-masing kelompok dibedakan dalam dua jenis usulan, yaitu : usulan dari kelompok perempuan dan usulan dari laki-laki atau campuran. Hasil dari Musyawarah Khusus Perempuan, baik berupa usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), maupun kegiatan pelatihan keterampilan ditetapkan bersama usulan laki-laki atau campuran. Dalam Musyawarah Desa Perencanaan inilah usulan desa ditetapkan untuk dilanjutkan ke MAD di tingkat kecamatan.

f. Penyusunan Proposal Usulan Kelurahan

Dari hasil Musyawarah Desa Perencanaan, disepakati usulan yang akan diajukan dalam MAD terdiri dari : Usulan Perempuan berupa SPP dan Pelatihan Keterampilan, dan usulan campuran berupa Peningkatan Jalan. Usulan tersebut kemudian disusun bersama oleh Tim Penulis Usulan (TPU), Fasilitator Desa (FD) dan Fasilitator Teknik (FT) dalam bentuk proposal untuk diajukan ke kecamatan guna dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di tingkat Kecamatan.

g. Kunjungan Verifikasi / Kelayakan

Verifikasi dari unsur teknis usulan dilakukan selama tahap pengkajian usulan hingga dipilihnya suatu kegiatan. Tim Verifikasi kecamatan terdiri dari tokoh masyarakat, fasilitator kecamatan dan tenaga teknis yang sesuai, yang direkomendasikan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten juga melakukan pemeriksaan akhir sebelum hasil verifikasi disampaikan dan dibahas dalam forum Musyawarah Antar Desa. Tim Verifikasi meninjau kriteria : apakah usulan tersebut layak secara teknis dan ekonomis?; apakah bermanfaat bagi orang banyak, khususnya orang miskin?; apakah ada rencana pemeliharaan (atau rencana pengembalian pinjaman untuk SPP)?; apakah masyarakat benar-benar berpartisipasi dalam

merumuskan usulan gagasan usulan?; apa bentuk sumbangan dari masyarakat?. Hal ini dilakukan untuk penempatan ranking pada kompetisi antar desa yang didasarkan pada sistem seleksi proyek dalam kompetisi PPK. Prioritas usulan kelurahan yang akan didanai PPK adalah dengan status kelayakan : *LAYAK*.

h. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan

Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Verifikasi, usulan yang masuk ke tingkat kecamatan dibahas dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD Prioritas Usulan). Dalam forum ini ditetapkan ranking usulan berdasarkan hasil pembahasan diskusi kelompok dan diskusi pleno. Dari hasil ranking inilah kemudian FK/KT bersama FD/FT dan Tim Penulis Usulan (TPU) membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan urutan ranking dari atas.

i. Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan

Pagu Anggaran SPP ditingkat kecamatan adalah 25 % dari alokasi PPK secara keseluruhan. Alokasi anggaran untuk PPK Klaten Tengah Tahun 2006 : Rp. 1.250.000.000,- sedangkan Tahun 2007 : Rp. 750.000.000,-.

Persyaratan pengajuan pinjaman SPP adalah foto copy KTP dan KK, tanda tangan Ketua RT, RW, Kepala Kelurahan ditujukan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ditingkat kecamatan. Sedangkan bunga pinjaman 1,5% dengan IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu) bagi kelompok yang tepat waktu membayar angsuran.

j. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan

Kegiatan pelatihan ketrampilan PPK yang dilaksanakan di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah yang terdiri dari kelompok perempuan dan kelompok pemuda. Kegiatan pelatihan meliputi Kursus Menjahit diikuti oleh 18 peserta, Kursus Bengkel Mobil Bensin 9 orang & Bengkel Sepeda Motor 18 orang, Setir Mobil 28 orang.

Kegiatan ketrampilan PPK yang dilaksanakan di Kelurahan Kabupaten diikuti dengan antusias oleh masyarakat, dimana masing-masing kegiatan diikuti oleh rata-rata 17-18 orang. Dengan jumlah anggaran yang dialokasikan secara proporsional untuk masing-masing kegiatan, maka kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

k. Pemeliharaan dan Pengembalian Pinjaman

Dalam rangka pelaksanaan dan kemudahan dalam pelaksanaan program ini, maka telah dibentuk tim pelestarian kegiatan (TPK). Tujuan utama dari dibentuknya kepengurusan ini adalah untuk memudahkan dalam pengawasan program yang telah dilaksanakan sebagai bentuk atau realisasi dari PPK ini. Adapun personil atau orang-orang yang ditunjuk dalam

keanggotaan / kepengurusan TPK ini didasarkan pada musyawarah desa, sehingga mereka yang ditunjuk diharapkan benar-benar memiliki kapabilitas yang tinggi karena benar-benar mendapat kepercayaan langsung dari masyarakat.

Evaluasi dan Masukan pelaksanaan PPK

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kelurahan Kabupaten, sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa I Sosialisasi

Model sosialisasi dilakukan bersifat searah (*one way communication*) dan instruktif. Sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar pengetahuan masyarakat tidak hanya sekedar tahu tentang PPK tetapi lebih punya rasa memiliki.

Sosialisasi program yang kurang menyeluruh, dapat berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat, hal ini dikhawatirkan bahwa masyarakat tidak memiliki kecukupan informasi tentang PPK dan masih memahami program khususnya untuk simpan pinjam khusus perempuan (SPP) ini sebagai program bantuan murni (*grand*). Padahal program tersebut adalah program bantuan yang bersifat pinjaman yang mementingkan aspek pemberdayaan.

2. Pelatihan Fasilitator

Fasilitator Desa (FD) dan Fasilitator Teknis (FT) adalah ujung tombak dari kegiatan PPK, maka mereka perlu diberi bekal pemahaman mengenai pendekatan partisipatif, mekanisme proyek, penggalangan kelompok, hingga administrasi proyek.

Pelatihan telah memberikan pengalaman dan pengetahuan baru, namun fasilitator merasa jumlah hari yang digunakan untuk pelatihan masih kurang sehingga perlu penambahan jumlah hari pelatihan disamping itu untuk meningkatkan pemahaman yang menyeluruh perlu adanya pendalaman lebih lanjut dengan rajin membaca modul-modul pelatihan. Disamping itu karena pada saat itu PPK adalah program baru, sehingga diperlukan setelah pelatihan perlu *on the job training* setelah pelatihan.

3. Pertemuan Kelompok RW

Setelah sosialisasi berkembang, masing-masing RW lebih cenderung memilih kegiatan sarana prasarana daripada kegiatan ekonomi produktif. Hal ini disebabkan karena masih banyak prasarana khususnya jalan dan saluran air yang kondisinya sudah rusak.

Dalam pelaksanaan penggalan gagasan diwilayah FD (Fasilitator Desa), FT (Fasilitator Teknik) diharapkan dapat melakukan sosialisasi tidak hanya sampai ke tingkat RW namun harus juga sampai ke tingkat RT, kelompok-kelompok PKK, Kelompok Remaja/Karang Taruna dan komunitas-komunitas kecil lainnya sehingga seluruh warga mendapatkan informasi yang cukup memadai tentang PPK.

4. Musyawarah Desa Khusus Perempuan

Dengan diberikannya kesempatan kepada kelompok perempuan untuk memilih 2 kegiatan dari 3 kegiatan yang akan diusulkan oleh kelurahan, maka Kelompok Perempuan harus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya sehingga dalam proses perencanaan dalam berjalan dengan baik.

5. Musyawarah Desa II (Musdes II)

Usulan dari RW yang masuk ke tingkat kelurahan terlalu banyak yang berwujud pembangunan sarana prasarana sehingga perlu dana besar, sedangkan dari usulan-usulan RW, yang akan dipihaki sangat terbatas yaitu hanya 1 (satu) kegiatan pembangunan fisik per kelurahan, dengan demikian harus ada kriteria khusus dalam menentukan kegiatan yang akan diusulkan yaitu tingkat urgensi usulan, ketermendesakan, jumlah peminfaat keluarga miskin, sehingga diharapkan prasarana yang ditetapkan sebagai usulan desa adalah prasarana memang betul-betul tingkat urgensinya tinggi, sangat mendesak serta daerah tersebut jumlah keluarga miskinnya banyak.

Untuk menghindari konflik antar wilayah, bagi RW yang tidak masuk dalam prioritas usulan (kalah dalam kompetisi), maka perlu adanya kesepakatan yang jelas bahwa usulan kegiatan yang tidak bisa didanai pada tahun yang bersangkutan dapat diprioritaskan pada tahun berikutnya atau diusulkan lewat program lain.

6. Kunjungan Verifikasi / Kelayakan

Verifikasi harus dilakukan oleh Tim yang betul-betul mempunyai kapasitas dan tidak ada unsur kedekatan dengan yang diverifikasi, hal ini untuk menjaga agar obyektivitas tetap terjaga.

7. Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan

Dalam penyepakatan usulan yang akan dibiayai oleh PPK harus ada standar yang baku dan jelas, serta komitmen penyepakatan atas kriteria-kriteria dalam

menentukan pemeringkatan sehingga tidak menimbulkan permasalahan antar desa/kelurahan.

8. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan

Jenis lapangan kerja yang diupayakan melalui program PPK adalah dengan mengembangkan pengelolaan lembaga keuangan dalam skala kecil oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam bentuk kegiatan simpan pinjam. Terbukanya lapangan kerja tidak hanya terbatas pada kegiatan simpan pinjam itu sendiri, namun lapangan kerja juga terbuka dengan tersedianya modal untuk membuka usaha baru maupun mengembangkan lembaga usaha kecil menjadi lebih besar dan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak.

Dalam SPP berlaku prinsip tanggung renteng, hal ini diharapkan dapat mendorong solidaritas kebersamaan antar anggota kelompok, sehingga kalau terjadi kemacetan atau permasalahan pada anggota kelompok, anggota lain ikut bertanggung jawab. Disamping itu untuk mencegah terjadinya tunggakan SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) membuat aturan berupa jaminan administrasi yang berupa barang, namun hanya berupa catatan barang yang diagunkan oleh peminjam yang diketahui oleh ketua kelompok SPP. Jaminan administrasi tidak ada perikatan dan hanya berupa catatan yang ada pada ketua kelompok, sehingga ketika ada anggota yang menunggak pembayaran angsurannya, penjualan jaminan yang ditulis dilaksanakan.

Pada saat ini banyak lembaga pemberi pinjaman yang ada di wilayah mulai dari : simpan pinjam RT, simpan pinjam RW, simpan pinjam PKK, UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dikelola kelurahan, Bank Kredit Kecamatan, Pegadaian, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Umum; dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga pemberi pinjaman tersebut diharapkan lembaga-lembaga tersebut harus bersinergi sehingga dapat mengefektifkan kinerja dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat.

9. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan

Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PPK seharusnya juga memuat materi peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kesadaran kritis masyarakat serta mendorong terjadinya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di setiap lokasi proyek PPK.

10. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana proyek memberikan kesempatan yang sangat luas bagi perseorangan maupun kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan, perancangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Sarana yang dibangun lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan / partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Sarana yang dibangun dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memobilisasi sumber daya untuk membangun proyeknya. Warga disamping gotong-royong juga ada tenaga ahli/tukang yang berasal warga setempat.

11. Pemeliharaan

Permasalahan terbesar yang bisa diperhatikan adalah pengaturan pemeliharaan pasca pembangunan sarana prasarana, dimana sangat sedikit sekali pemikiran serius tentang tingginya biaya perbaikan yang muncul secara periodik seperti cuaca alam yang turun naik yang bisa mempercepat perubahan fisik suatu proyek, dana harus disisihkan untuk perbaikan. Perlu ada solusi bagi wilayah yang terbangun sarana prasarananya adalah wilayah yang cukup banyak jumlah warga miskinnya. Perlu adanya jaminan atas ketersediaan dana bagi tim pemelihara baik untuk pemeliharaan periodik maupun darurat saat dibutuhkan tinggal dilaksanakan tidak mengganggu fungsi pemakaian.

Keswadayaan pada kegiatan pemeliharaan masih relatif rendah sehingga pemeliharaan yang dilakukan hanya terbatas pada pekerjaan minor yang tidak membutuhkan dana untuk perbaikan konstruksi dan upah pekerja. Sifat paternalistik juga sangat mempengaruhi karena kegiatan akan berjalan kalau ada perintah dari tokoh masyarakat yang dihormati. Partisipasi masyarakat paling besar terjadi pada tahapan pelaksanaan, sedang partisipasi menjadi berkurang pada waktu tahapan pemeliharaan dan pelestarian.

Dampak yang ditimbulkan dari PPK dapat dilihat dari dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan modal bergulir yang diberikan kepada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), pemberian ketrampilan melalui kursus-kursus untuk meningkatkan jiwa wirausaha dan memperluas lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dampak sosial positif ditandai dengan beberapa kecenderungan. *Pertama*, menguatnya peran RT, RW sebagai dasar kelembagaan masyarakat akan meningkatkan kegairahan dan keberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Penguatan peran RT, RW ini memiliki dampak positif karena dapat mengimbangi peran pemerintah kelurahan yang selama ini lebih mendominasi keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Kedua, meningkatnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan berarti semakin meningkatnya kontrol masyarakat pada kegiatan pembangunan. Di berbagai pertemuan masyarakat yang diamati menunjukkan gejala tersebut dengan munculnya keaktifan dalam berbicara, berpendapat, bahkan berbeda pendapat dengan para tokoh atau aparatur pemerintah. Aspirasi masyarakat yang sering berbeda dengan para tokohnya menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat mulai tumbuh, sebagai contoh sederhana masyarakat miskin lebih menginginkan dana PPK sebagai modal usaha, masyarakat lain menginginkan sarana fisik dan kegiatan pelatihan ketrampilan.

Ketiga, masyarakat mulai kritis dan berani berbeda pendapat terhadap kegiatan pembangunan di desanya. Perkembangan ini tentu dapat berarti positif apabila diikuti dengan kemauan dan kemampuan atau perubahan sikap dan perilaku para birokrat ditingkat bawah untuk menjadi lebih aspiratif.

Keempat, pertumbuhan kelompok masyarakat dapat berarti secara kualitas semakin meningkat dan secara kuantitas semakin banyak. Pertumbuhan ini dianggap positif apabila sungguh-sungguh dilakukan untuk pemberdayaan, artinya bukan hanya dalam menyongsong kucuran dana PPK. Masyarakat secara rasional memanfaatkan kelompok yang telah ada, tinggal diperkuat dan diselenggarakan mekanisme operasional yang sesuai dengan sasaran dan tujuan PPK.

Kelima, kompetisi yang tumbuh di kalangan kelompok masyarakat merupakan perkembangan positif. Pernyataan seorang tokoh masyarakat menarik untuk disimak “Kami yakin jalan yang dibangun ini lebih efisien dan berkualitas dibanding jalan yang dibuat para pemborong atau kontraktor”. Kompetisi dibidang usaha produktif terjadi, terutama dalam peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Kompetisi ini juga dirasakan dari cerita keberhasilan dari desa atau kecamatan lain. Dalam proses ini memang diperlukan adanya komunikasi dan monitoring yang efektif dari aparat atau fasilitator dari konsultan, sehingga mereka merasa malu bila kelompoknya gagal.

Keenam, perubahan sikap di aparat nampak mulai terjadi terutama didorong oleh kontrol publik dan tuntunan keterbukaan.

Disamping dampak sosial yang positif tersebut, dapat pula dilihat dampak sosial negatif yang ditandai dengan munculnya berbagai permasalahan dan kecenderungan negatif. *Pertama*, kecemburuan terjadi kalangan kelompok yang merasa miskin tetapi tidak kebagian dana pinjaman. Mereka sesungguhnya telah diseleksi melalui musyawarah kelompok masyarakat, tetapi ada saja yang merasa miskin dan minta diberi pinjaman. Kecemburuan ini juga muncul dikalangan perangkat desa dengan pertanyaan “apakah saya tidak berhak?”, tentu saja dikembalikan pada keputusan masyarakat. Bila perangkat desa termasuk kriteria yang memperoleh manfaat dari PPK tentu saja berhak. Kecemburuan ini dapat bersifat menghambat jalannya pengambilan keputusan di tingkat kelurahan.

Kedua, ancaman terhadap sistem gotong royong dan solidaritas sosial dapat terjadi, karena pekerjaan yang sifatnya fisik semua dihargai tenaganya dengan upah. Maksudnya pekerjaan ini membuka peluang bagi tukang dan buruh bangunan yang kehilangan pendapatan karena krisis. Namun disisi lain sifat gotong-royong dapat terkikis karena setiap pekerjaan PPK ada upahnya. Disini muncul kontradiksi, disatu sisi PPK membantu pendapatan kelompok miskin dan disisi lain ada kecenderungan merapuhkan solidaritas sosial organik yang selama ini telah ada di masyarakat.

Ketiga, masalah ketimpangan gender muncul sebagai kebiasaan yang selama ini berlangsung. Disejumlah pertemuan membahas perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan PPK nampak kehadiran perempuan masih terbatas atau dengan kata lain kegiatan ini masih banyak diikuti oleh kaum pria. Padahal banyak pengamat menyatakan bahwa dimasa krisis ini yang paling menderita kaum perempuan yang harus menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan menyediakan kebutuhan bagi anggota keluarga. Disatu sisi kaum perempuan memiliki potensi untuk menjadi pelaku ekonomi.

Kesimpulan

Pelaksanaan PPK dalam penanggulangan kemiskinan yang meliputi musyawarah perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan, menunjukkan bahwa ada dukungan yang baik dari pelaksana program ditingkat lokal, sumber daya baik sumber daya manusia, dana maupun sarana dan prasarana. Secara kualitas dan kuantitas kondisi sumber daya manusia sudah memenuhi, kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan cukup baik yang dibuktikan dengan swadaya dapat membantu kelancaran

kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan program PPK juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, ketrampilan, pengurangan pengangguran, dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil pelaksanaan PPK di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah menunjukkan hasil yang baik, yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat dan meningkatnya tingkat kemandirian masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), pendidikan ketrampilan yang meliputi : menjahit dasar sampai terampil, mengemudi, bengkel mobil dan motor, yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan ketrampilan sehingga dapat hidup lebih mandiri.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Baswir, Revrisond, 1999, *Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Penemuan Hal Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru*, Yogyakarta: IDEA dan Pustaka Pelajar.
- Darwin, Muhadjir, M, 2005, *Memanusiakn Rakyat : Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*, Yogyakarta: Benang Merah.
- Dunn, William, N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Islamy, Irfan, 1994, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Marnia, Nes, 2008, *PNPM Mandiri Perkotaan dan Kemiskinan*, Jakarta, PNPM Mandiri.
- Moleong, L., 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M.Q., 1984, *Qualitative Evaluation Methods*, Beverly Hills: Sage Publications.
- Sanapiah, Faizal, 1999, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soegijoko dan Kusbiantoro, 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Subarsono, A. G., 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 1998, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Suparlan, Parsudi, 1993, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Surya Dharma dan Pinondang Simanjuntak. *Paradigma Birokrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah*, *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, Vol. III. No. 3 Oktober 2000, h. 59.
- Suyanto, Bagong, 1995, *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya*, Surabaya: Airlangga University Press.
- The Worl Bank Group, *Decentralization & Subnational Regional Economics. What, Why, and Where*,
<http://www1.worldbank.org/publicsector/DecentralizationSubNationalEconomics/what.htm>, diakses 5 September 2008.
- Usman, Sunyoto, 2008, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahab, Abdul S., 1997, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [Http://komfis.wordpress.com](http://komfis.wordpress.com), *Kemiskinan dan Penanggulangannya*, diakses tanggal 15 Nopember 2008.

Referensi:

- Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Jakarta: Tim Koordinasi Pengembangan Kecamatan, 2000.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2009 Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Program Dasar Pembangunan Partisipatif.
- Laporan Akhir Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Tahun 2006.
- Laporan Akhir Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Tahun 2007.